

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH****Durotun Nafisah, <sup>✉</sup> Widiyanto, Wijang Sakitri**

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima september 2017

Disetujui Oktober 2017

Dipublikasikan Oktober 2017

*Keywords:**Manajemen;Pembiayaan Pendidikan***Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan pembiayaan antara sekolah di desa dan di kota. Di sisi lain sekolah di desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu dengan biaya yang terjangkau. Maka dari itu diperlukan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pembiayaan pendidikan di MA Ribhul Ulum. Manajemen pembiayaan di MA Ribhul Ulum dimulai dari perencanaan, pencatatan, pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. Proses perencanaan keuangan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran, menyusun, mengusulkan, revisi, hingga pengesahan RAPBM. Dokumen-dokumen dalam pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum seperti buku kas, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan, dan buku tabungan telah mampu menjelaskan kondisi keuangan yang ada di MA Ribhul Ulum. Proses pengawasan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan menentukan standar, membandingkan pelaksanaan dengan standar, mengidentifikasi penyimpangan, hingga penemuan solusi atas penyimpangan. Dalam proses pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan hingga pengesahan laporan keuangan. Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

**Abstract**

The research was distributed by financing gap between schools in the village and in the city. On the other hand the school in the village is claimed to be able to organize education quality with affordability. Therefore necessary management focus on the quality of education, with the utilization of the Fund's resources effectively and efficiently. This field study using qualitative descriptive analysis method that aims to find out how the education financing process management in MA. Financing management in MA started with planning, record-keeping, supervision and financial accountability. In the process of financial planning or preparation of RAPBM (plant income and expenditure madrasah) has been done systematically and using the principle of effective and efficient. Documents in financial record-keeping in MA as the cash book, receipt book, cash helper salaries, associate book bank, and the financial statements has been able to explain the financial conditions that exist in MA. The process of surveillance in MA using RAPBM as the standard, the supervision carried out by the head internally madrasah, while surveillance external conducted by Government and foundations. Financial accountability reports compiled by the head of the madrasa and Treasurer of the madrasa. Financial accountability report was compiled to the Government every three months, while financial accountability reports to the Foundation of laid out at the end of the year.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [durotunnafisah26@gmail.com](mailto:durotunnafisah26@gmail.com)

p-ISSN 2252-6544

e-ISSN 2502-356X

## PENDAHULUAN

Bukan kekayaan alam, ras, dan usia peradaban yang menjadi faktor Negara maju dan sejahtera, akan tetapi sikap hidup orang-orang yang berada di tiap Negara. Sikap hidup ini berlatar kebudayaan. Namun pada intinya terbentuk oleh proses pendidikan selama bertahun-tahun.

Seperti yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan nasional memiliki visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah”.

Berdasarkan hasil pengendalian mutu pendidikan, menyebutkan bahwa pendidikan memegang peranan kunci, dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas (Sukmadinata, 2008). Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemakan pesan-pesan konstitusi serta dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian (Mulyasa, 2005).

Investasi dalam bidang pendidikan tentu saja akan memberikan dampak yang lebih besar dari pada investasi dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu para orang tua berupaya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu (Sani, 2005).

Danim (2007) menyebutkan bahwa pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi

kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Menurut Supriyadi (2003) biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan.

Pembiayaan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan (Mulyono, 2010).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya. Agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga dalam hal pengelolaan perlu dilakukan manajemen keuangan yang baik (Mulyasa, 2005).

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2005).

Menurut Mulyono (2009) manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara continue terhadap biaya pendidikan operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu tujuan pendidikan.

Analisis efektifitas biaya yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan. Perbedaan karakteristik situasi dan input mempunyai implikasi pada biaya pendidikan yang diperlukan. Karena itu keputusan tentang efisiensi haruslah kontekstual dan proporsional. Keputusan kontekstual dan proporsional ini sangat membutuhkan ketersediaan informasi tentang karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai (Mulyasa, 2005).

Sedangkan Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. (a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya (Choiriyah, 2014).

Kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang tidak merata, salah satunya adalah kesenjangan pembiayaan pendidikan antara sekolah di desa dan sekolah di kota, akan tetapi sekolah di desa maupun sekolah di kota sama-sama dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas terutama dalam penyelenggaraan UN (Ujian Nasional), dikarenakan penyelenggaraan UN di Indonesia tidak memandang kondisi sosial dan ekonomi dari masing-masing sekolah.

Masyarakat desa yang umumnya berada pada kondisi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah berharap agar penyelenggaraan pendidikan di daerahnya diselenggarakan dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tentu saja ikut serta membantu terselenggaranya pendidikan di daerah pedesaan. Masalah yang dihadapi setelah terselenggaranya pendidikan untuk masyarakat desa tidak sampai disitu saja. Peningkatan mutu kualitas pendidikan juga harus senantiasa diperhatikan setiap tahunnya. Mutu pendidikan juga penting untuk diperhatikan supaya kesenjangan mutu antara pendidikan di kota dan di desa tidak begitu mencolok.

Di sinilah peran penting sebuah lembaga pendidikan untuk bisa mengelola pembiayaannya dengan baik agar dana yang ada dapat dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan. MA Ribhul Ulum sebagai sekolah

swastayang berdiri di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah mampu menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dengan membebaskan peserta didik dari biaya uang gedung, biaya SPP (Sumbangan Pembinaan pendidikan), biaya ujian tengah semester, serta biaya ujian semester. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang murah ternyata MA Ribhul Ulum Kedungmutih mampu meluluskan seluruh peserta didik dalam penyelenggaraan UN yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan hasil rata-rata UN di MA Ribhul Ulum kedungmutih lebih tinggi dari nilai rata-rata UN pada tingkat kabupaten dan provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan yang murah dan mampu meluluskan peserta didik dalam penyelenggaraan UN tentu mengharuskan manajemen sekolah mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien sehingga sekolah tetap mampu meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya. Menurut Luneto (2015) manajemen pembiayaan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah dana yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan (Mulyasa, 2005). Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga (Fattah, 2002).

Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras

dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah (Suharsimi & Lia, 2009). Akuntansi pendidikan merupakan mekanisme peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu pada suatu entitas, sehingga akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan yang terkait dengan pendidikan (Bastian, 2006).

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajer hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknik yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional (Sutomo, 2012).

Pertanggungjawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan atau proposional atau secara lebih rinci bisa ditegaskan bahwa, pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan mencakup seluruh penerimaan hingga pengeluaran dana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Choiriyah, 2014).

Pertanggungjawaban keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas suatu lembaga akan terbangun melalui tiga pilar utama yang menjadi syaratnya, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. (2) adanya kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat (Choiriyah, 2014).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih? (2) Bagaimana proses pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum kedungmutih? (3) Bagaimana proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih? (4) Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (2) Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (3) Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih. (4) Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi. Semua data dan informasi baik berupa data primer maupun data sekunder diwujudkan dalam bentuk deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan proses manajemen pembiayaan pendidikan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih yang terdiri atas proses penganggaran, proses pencatatan keuangan, proses pengawasan keuangan, dan proses pertanggungjawaban keuangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang bersumber dari kepala MA Ribhul Ulum, Bendahara MA Ribhul Ulum, dan Ketua Yayasan Ribhul Ulum. Observasi terkait dengan manajemen pembiayaan, dan dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan juga uji konfirmasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kegiatan manajemen selalu dimulai dengan proses perencanaan, begitu juga kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di MA

Ribhul Ulum Kedungmutih yang dimulai dengan kegiatan perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan harus dilaksanakan secara sistematis. Dalam proses penganggaran di MA Ribhul Ulum dimulai dengan mengadakan (1) rapat pleno madrasah, (2) mengidentifikasi rencana penerimaan madrasah, (3) mengidentifikasi rencana pengeluaran madrasah, (4) menyusun RAPBM, (5) melakukan revisi RAPBM, (6) hingga pada tahap pengesahan RAPBM.

Sebelum tahun ajaran baru dimulai MA Ribhul Ulum Kedungmutih mengadakan rapat pleno madrasah terkait dengan pembahasan RAPBM. pada tahun ajaran 2017/2018 rapat pleno diselenggarakan pada tanggal 20 juni 2017 rapat ini dihadiri oleh kepala madrasah, 10 dewan guru, bendahara madrasah, ketua yayasan, 2 perwakilan pengurus Yayasan Ribhul Ulum Kedungmutih dan 58 orang tua siswa MA Ribhul Ulum Kedungmutih.

Rapat Pleno yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali ini membahas pembiayaan madrasah diantaranya pembahasan terkait apa saja biaya yang akan dibebankan kepada wali murid sekaligus menentukan berapa besaran nominalnya, serta pembahasan terkait dengan penyusunan RAPBM. Dalam rapat pleno ini juga dibahas tentang rencana pengembangan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan selama satu tahun ke depan.

Sebelum menyusun RAPBM, pihak sekolah harus mengidentifikasi apa saja yang menjadi sumber penerimaan sekolah. Proses ini menjadi penting untuk mengetahui apakah penerimaan tersebut sudah bisa mencukupi pembiayaan pendidikan atau sekolah perlu mencari sumber penerimaan lainnya. Sumber-sumber pendapatan yang telah diidentifikasi kemudian dihitung dan diperkirakan besarnya. Sumber penerimaan yang diperoleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih berasal dari dana BOS.

Dalam menentukan rencana pengeluaran MA Ribhul Ulum Kedungmutih mengacu pada visi, misi madrasah. Dengan mengacu visi, misi madrasah akan membuat pengeluaran madrasah menjadi efektif karena sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Madrasah. Pengeluaran madrasah terdiri dari pengeluaran program

sekolah, pengeluaran non program sekolah serta belanja lain-lain.

Setelah melakukan identifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran madrasah selanjutnya kepala madrasah dan bendahara madrasah memformulasikan berapa besar nominal untuk setiap pos pengeluaran ke dalam RAPBM yang disusun sesuai dengan bentuk draf yang telah disepakati. Draft RAPBM yang telah disusun tersebut nantinya akan diusulkan kepada pihak yayasan untuk disetujui. Setelah draft RAPBM diusulkan kepada pihak yayasan langkah selanjutnya yaitu pembahasan RAPBM antara kepala madrasah dan ketua Yayasan Ribhul Ulum Kedungmutih, jika dalam rapat tersebut dikehendaki adanya perubahan atau revisi maka kepala madrasah dan bendahara madrasah harus melakukan revisi atau perbaikan RAPBM terlebih dahulu.

RAPBM yang telah diperbaiki nantinya akan disahkan atau disetujui untuk dilaksanakan. Pengesahan RAPBM dilakukan oleh kepala sekolah dan ketua yayasan, yaitu dengan ditandatanganinya RAPBM tersebut, sehingga RAPBM dapat segera dilaksanakan oleh madrasah.

Penyusunan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Madrasah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah, maka dari itu RAPBM perlu direncanakan. Dalam proses penganggaran di MA Ribhul Ulum dimulai dengan mengadakan (1) rapat plenom madrasah, (2) mengidentifikasi rencana penerimaan madrasah, (3) mengidentifikasi rencana pengeluaran madrasah, (4) menyusun RAPBM, (5) melakukan revisi RAPBM, (6) hingga pada tahap pengesahan RAPBM.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fattah (2009) terdapat beberapa perbedaan antar pendapat Fattah dengan implementasi penganggaran atau penyusunan anggaran di MA Ribhul Ulum. Dalam pendapat Fattah tahapan pertama dalam penganggaran adalah melakukan identifikasi kegiatan selama satu tahun anggaran, sedangkan pelaksanaan di MA Ribhul Ulum tahapan pertama yaitu mengadakan rapat plenom madrasah, dalam rapat pleno ini peserta rapat melakukan

pembahasan terkait dengan pembiayaan pendidikan dan juga rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh MA Ribhul Ulum selama satu tahun anggaran, artinya MA Ribhul Ulum juga melakukan identifikasi kegiatan selama satu tahun anggaran di dalam rapat pleno.

Perbedaan lain antara pendapat Fattah dan juga pelaksanaan perencanaan keuangan di MA Ribhul Ulum adalah identifikasi terhadap pengeluaran-pengeluaran selama satu tahun anggaran. Selain melakukan identifikasi terhadap penerimaan madrasah, MA Ribhul Ulum juga melakukan identifikasi terhadap pengeluaran madrasah sehingga madrasah dapat mendahulukan pengeluaran-pengeluaran yang menjadi prioritas madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Identifikasi terhadap pengeluaran juga diperlukan untuk memudahkan madrasah atau sekolah melaksanakan penganggaran keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu identifikasi pengeluaran dapat memudahkan madrasah dalam penyusunan anggaran, karena madrasah telah mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang harus diprioritaskan dalam peningkatan mutu madrasah.

Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan sekolah baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran selalu dilakukan pembukuan untuk menghindari terjadinya salah tulis, atau salah paham di kemudian hari karena bendahara lupa mencatat transaksi yang telah terjadi. Bentuk-bentuk pembukuan atau pencatatan keuangan yang digunakan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih meliputi buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan, faktur, dan juga buku tabungan.

Format buku kas umum yang digunakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih memuat tanggal, no. kode, no. bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Fungsi buku kas umum adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap hari, selain itu juga memuat saldo setiap akhir bulannya. Buku kas umum ini dicatat dan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah. Melalui buku kas umum ini kepala

madrasah dapat mengetahui berapa penerimaan dan pengeluaran madrasah.

Buku pembantu kas di MA Ribhul Ulum Kedungmutih ini dimaksudkan untuk membantu pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Sama halnya dengan buku kas umum tapi dalam buku pembantu kas ini lebih berfungsi untuk membantu pencatatan sebelum dipindahkan ke buku kas umum. Dalam buku pembantu kas terdapat kolom debit untuk saldo penerimaan dan kolom kredit untuk pengeluaran. Buku pembantu kas ini biasanya digunakan pada saat dana BOS belum diterima oleh madrasah.

Perencanaan keuangan di MA Ribhul Ulum telah menganut prinsip pembiayaan pendidikan yang efektif, maksudnya adalah alokasi dana yang ada digunakan sesuai dengan visi dan misi madrasah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sesuai visi dan misi dana yang ada sebagian besar dialokasikan untuk program sekolah. Sedangkan penggunaan prinsip efisien maksudnya adalah MA Ribhul Ulum dalam peningkatan mutu pendidikan mampu menekankan biaya, terutama biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Buku penerimaan gaji di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dibuat untuk mencatat gaji para guru dan karyawan yang telah dibayarkan. Gaji para guru dan karyawan ini diberikan setiap satu bulan sekali. Setiap guru dan karyawan menerima gaji sesuai dengan beban kerja yang dibebankan kepada guru dan karyawan tersebut. Guru dan karyawan diharuskan memberikan tanda tangan rangkap dua sebagai bukti bahwa guru atau karyawan tersebut telah menerima gaji pada setiap bulannya.

Buku pembantu bank di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penggunaan jasa bank. Pembukuan rekening bank sangat diperlukan karena melalui rekening milik madrasah dana BOS dapat dicairkan. Buku pembantu bank ini dibuat setiap satu bulan sekali sebagai laporan. Format buku pembantu bank yang digunakan adalah tanggal, no. kode, no. bukti, uraian, debit untuk penerimaan, kredit untuk pengeluaran, serta saldo.

Laporan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dibuat setiap bulan. Laporan

keuangan ini dibuat dengan format nomor, tanggal dan nama transaksi, debit, kredit, dan saldo. Laporan keuangan ini akan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah untuk memudahkan kepala madrasah dalam mengontrol keuangan madrasah mengenai penerimaan dan pengeluaran madrasah setiap bulannya.

Dokumen lain yang digunakan dalam pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih yaitu faktur. Yang dimaksud faktur dalam pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum disini dapat berupa nota kontan, kuitansi, ataupun bukti pembayaran dan bukti pembelian lainnya yang sah sebagai bukti transaksi.

Pembukuan dalam proses pencatatan keuangan yang juga digunakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih adalah buku tabungan. Buku tabungan disini adalah buku besar yang berisi tentang catatan tabungan siswa atau uang siswa yang disimpan di sekolah. Setiap siswa memiliki nomor akun sendiri dalam buku tabungan yang dibawah oleh bendahara sekolah.

Proses pencatatan keuangan pendidikan merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk melaksanakan transparansi keuangan pendidikan. Beberapa catatan keuangan yang digunakan oleh MA Ribhul Ulum dalam proses pencatatan keuangan diantaranya adalah buku kas umum, buku pembantu kas, faktur, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan dan juga buku tabungan.

Pembukuan yang dilakukan oleh MA Ribhul Ulum menggunakan berbagai pembukuan dengan fungsi akuntansi yang berbeda pada setiap bukunya, akan tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Fattah (2004) maka terdapat beberapa pembukuan yang tidak dilakukan oleh MA Ribhul Ulum seperti buku pos, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang serta neraca percobaan. Dan juga terdapat beberapa pembukuan yang dilakuakn oleh MA Ribhul Ulum akan tetapi tidak terdapat pada pendapat Fattah seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan, dan buku tabungan.

MA Ribhul Ulum tidak menggunakan buku pos karena penggunaan buku pos dirasa

kurang efektif, dikarenakan bendahara diharuskan melakukan pencatatan di dua pembukuan yaitu buku pos, dan buku kas umum. Jurnal tidak digunakan dalam pencatatan keuangan karena pencatatan setiap harinya dicatat di buku kas umum. Buku kas pembayaran uang sekolah tidak digunakan karena madrasah tidak membebankan uang sekolah kepada siswa sehingga buku kas pembayaran tidak dibutuhkan. Neraca percobaan tidak digunakan oleh madrasah karena dalam kontrol keuangan yang dilakukan oleh kepala madrasah setiap bulannya menggunakan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara.

Buku pembantu kas digunakan dalam pencatatan keuangan di MA Ribhul Ulum untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi sebelum di pindahkan ke buku kas umum, selain itu buku pembantu kas ini lebih difungsikan pada saat dana BOS belum diterima madrasah. Penggunaan buku penerimaan gaji di MA Ribhul Ulum untuk mencatat besaran gaji yang harus dibayarkan kepada guru dan karyawan setiap bulannya, buku penerimaan gaji disini juga sebagai bukti sah pembayaran gaji guru dan karyawan dikarenakan setiap guru dan karyawan yang telah menerima gaji diharuskan menandatangani buku penerimaan gaji ini. Dana BOS yang diterima oleh MA Ribhul Ulum dicairkan lewat rekening bank maka dari itu penggunaan buku pembantu bank diperlukan untuk mengetahui jumlah uang madrasah yang tersimpan di bank. Laporan keuangan diperlukan untuk memudahkan kepala madrasah melakukan kontrol atas keuangan madrasah setiap bulannya. Penggunaan buku tabungan yang dilakukan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih untuk mengetahui berapa besaran uang siswa yang ditabung di sekolah.

Setiap pembukuan akuntansi dalam pencatatan keuangan memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing. Sehingga dalam proses pencatatan keuangan pembukuan akuntansi yang digunakan seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah, pembukuan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah nantinya akan membuat proses pencatatan keuangan menjadi efektif dan efisien.

Melalui pencatatan keuangan ini madrasah mampu melaksanakan dan menjaga akuntabilitas keuangan madrasah, maksudnya adalah uang yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti orang tua siswa, yayasan, maupun pemerintah.

Pengawasan keuangan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih yang berfungsi sebagai kontrol atas perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Pengawasan keuangan perlu dilakukan sebagai bentuk wujud transparansi keuangan madrasah, melalui pengawasan keuangan ini pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dan yayasan dapat mengetahui kondisi keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih.

Pengawasan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran keuangan dengan cara melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan dan perencanaan keuangan. Pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan keuangan secara internal dilakukan oleh kepala sekolah setiap satu bulan sekali, dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara. Sedangkan pengawasan keuangan secara eksternal dilakukan oleh ketua yayasan dan pemerintah. Pengawasan oleh ketua yayasan dilakukan setiap satu tahun sekali, sedangkan pengawasan keuangan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama dilakukan setiap tri wulan sekali.

Pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang sudah dianggarkan benar-benar dibelanjakan dengan semestinya. Proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum dimulai dengan penentuan standar, pelaksanaan pengawasan, pengawas keuangan melakukan identifikasi penyimpangan yang ada, dan yang terakhir yaitu mencari solusi atas penyimpangan yang telah ditemukan.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan membandingkan, antara pelaksanaan dengan apa yang direncanakan, maka dari itu harus ada pembanding dan yang dibandingkan. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan yang dimaksud dengan pembanding adalah standar

atau patokan untuk pengawas keuangan melakukan proses pengawasan keuangan. Standar atau Patokan pengawasan yang digunakan oleh pengawas keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih adalah RAPBM.

Setelah para pengawas keuangan menentukan standar maka langkah selanjutnya yaitu pengawas keuangan baik pengawas internal maupun pengawas eksternal melakukan proses pengawasan. Proses pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan dengan rencana atau membandingkan laporan keuangan dengan RAPBM. Pelaksanaan pengawasan keuangan secara internal dilakukan oleh kepala madrasah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan setiap satu semester sekali, dan pengawasan yang dilakukan oleh ketua yayasan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

Melakukan kegiatan pemeriksaan tidak selalu sesuai dengan rencana, ada kemungkinan pada pertengahan tahun terdapat salah satu pembiayaan yang tidak sesuai dengan rencana. Melalui proses pengawasan ini para pengawas keuangan baik pengawas internal maupun pengawas eksternal dapat menentukan apa saja yang tidak sesuai dengan rencana.

Setelah ditemukannya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan maka pengawas keuangan harus mampu menemukan solusi atau penyelesaian atas masalah tersebut. Kepala madrasah sebagai pengawas keuangan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah yang ada. Pengambilan keputusan terkait dengan keuangan tidak dilakukan oleh kepala madrasah saja akan tetapi kepala madrasah berdiskusi dulu bersama ketua yayasan.

Proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum pada dasarnya telah sesuai dengan proses pengawasan yang dikemukakan oleh Fattah (2002) yaitu proses pengawasan keuangan dimulai dengan penentuan standar. Standar pengawasan keuangan yang ditetapkan oleh pengawas keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih yaitu RAPBM. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan,

pelaksanaan pengawasan dapat pula diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan standar yang telah ditetapkan, pengawasan keuangan dilakukan oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Pada saat pelaksanaan pengawasan pengawas keuangan melakukan identifikasi apakah ada penyimpangan atau tidak, setelah melakukan identifikasi terhadap adanya penyimpangan, pengawas keuangan harus mampu mencari solusi atau mampu mengambil keputusan terkait penyimpangan yang telah ditemukan tersebut.

Setiap lembaga publik terutama lembaga yang menggunakan dana publik seperti sekolah, harus melakukan pertanggungjawaban keuangan, begitu juga dengan MA Ribhul Ulum yang melakukan pertanggungjawaban keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas suatu lembaga. Melalui laporan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa MA Ribhul Ulum Kedungmutih telah menggunakan uang madrasah secara bertanggungjawab dan sesuai rencana.

Proses pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan penyusunan laporan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan kepada Yayasan Ribhul Ulum Kedungmutih, langkah selanjutnya setelah disusunnya laporan pertanggungjawaban adalah persetujuan atau pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh ketua yayasan.

Setiap bulan bendahara menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada kepala madrasah sehingga kepala madrasah dapat mengetahui seberapa besar penerimaan yang didapatkan oleh madrasah dalam satu bulan dan seberapa besar pengeluaran yang dibelanjakan oleh madrasah dalam satu bulan. Setiap tri wulan kepala madrasah dan bendahara madrasah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang ditujukan kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban ini digunakan untuk menyatakan bahwa dana BOS yang diterima madrasah telah dipergunakan sesuai dengan prosedur penggunaannya.

Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk yayasan disusun setiap satu tahun sekali.

Laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak Yayasan Ribhul Ulum Kedungmutih disusun setiap akhir tahun ajaran. Pemeriksaan terkait dengan kegiatan, program kerja serta kondisi keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih yang dilaporkan oleh madrasah apakah telah sesuai dengan yang direncanakan pada awal tahun ajaran atau tidak. laporan pertanggungjawaban dapat dikatakan sah ketika laporan pertanggungjawaban ditandatangani oleh ketua yayasan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari suatu lembaga terlebih bagi lembaga yang menggunakan sumber dana publik. MA Ribhul Ulum Kedungmutih melakukan proses pertanggungjawaban keuangan yang dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah berisi laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana, dan penggunaan dana secara keseluruhan selama satu tahun anggaran. Hal ini telah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyasa (2005:178) tentang pertanggungjawaban keuangan, dimana pertanggungjawaban keuangan menyangkut proses pertanggungjawaban penerimaan dana dan penggunaan dana sekolah.

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih jika dikaitkan dengan pendapat Mulyasa (2005) tentang proses pertanggungjawaban keuangan maka terdapat perbedaan yaitu pada pengesahan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh madrasah dan diserahkan kepada pihak yayasan, nantinya akan disahkan oleh ketua yayasan.

Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan karena laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dapat dijadikan bukti kongkrit bahwa madrasah telah melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## SIMPULAN

Penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi sumber penerimaan madrasah, mengidentifikasi pengeluaran madrasah, menyusun RAPBM, mengusulkan RAPBM, melakukan revisi RAPBM, hingga pada tahap pengesahan RAPBM.

Pembukuan-pembukuan akuntansi yang digunakan oleh MA Ribhul Ulum Kedungmutih dalam proses pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan serta buku tabungan.

Proses pengawasan keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan pihak eksternal, mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan, hingga pada tahap penemuan solusi untuk penyimpangan yang telah ditemukan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga publik, dalam proses pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Ribhul Ulum yaitu dimulai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan, hingga pengesahan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, India.(2006). *Akuntansi pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Choiriyah, Ngismatul. (2014). *Manajemen Sumber Daya Anggaran Keuangan Pendidikan.Jurnal Studi Agama & Masyarakat*.Vol. 8 No. j Hal.88-jjm. Palangka Raya: STIAN Palangka Raya.
- Danim, Sudarman. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah ( Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fattah, Nanang. (2002). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Fattah, Nanang. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Luneto, Buhari. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.Vol. 1 No. k Hal.jl-ku. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono.(2009). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono.(2009). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sani, Ridwan Abdullah., Pramuniati, Isda., Mucktiany, Anies. (2015). *Penjaminan Mutu pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih., Jami'at, Ayi Novi., Ahman. (2008). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, Instrument)*. Bandung: Reflika Aditama.
- Supriyadi, Dedi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutomo, Titi Prihatin. (2012). *Manajemen Sekolah*. Semarang: Unnes Press.